

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pariwisata telah menjadi sektor unggulan (*leading sector*) yang memiliki banyak dampak (*multiplier effect*) terutama bagi pendapatan suatu negara. Pariwisata sendiri menjadi salah satu kepentingan pilihan yang mana pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah berkolaborasi dalam penyelenggaraannya (Daraba, 2020). Adanya kapasitas, proyeksi penyerapan SDM, dan pendayagunaan lahan merupakan alasan pemerintah daerah melakukan pengelolaan terhadap urusan pariwisata. Saat ini, pariwisata menjadi sektor yang menyumbangkan pendapatan terbesar bagi negara. Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2022 menyumbang pendapatan devisa negara sebesar 64 triliun dengan angka kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 769,39 persen.

Adanya desentralisasi membuat tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki keleluasaan untuk menumbuhkan kapasitas pariwisata yang ada pada masing-masing daerah. Pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari industri atau usaha pariwisata yang terlibat dalam memberikan pelayanan jasa kepada wisatawan. Dikarenakan aktivitas pariwisata tidak hanya melibatkan satu aspek, maka pengelolaan pariwisata membutuhkan lebih dari peran satu *stakeholders*. *Stakeholders* pariwisata memiliki kontribusi yang besar dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata. *Stakeholder* sendiri diartikan sebagai suatu individu

atau sekumpulan manusia yang memiliki pengaruh atau dapat terpengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Wheelen dan Hunger, 2018).

Potensi dari industri pariwisata selaras dengan perlunya pembiayaan pengembangan yang cukup besar pada tiap daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu sumber APBD secara umum tidak mampu mencukupi kebutuhan pengelolaan daerah (Ni'mah, 2016). Maka dari itu dibutuhkan langkah strategis berupa kemitraan (*partnership*) yang dilakukan oleh pengelola wisata atau pihak yang memiliki otoritas pengelolaan pengembangan pariwisata. *Public-Private Partnership* menjadi suatu langkah atau strategi utama dalam pengembangan wisata.

Public-Private Partnership (PPP) dikenal sebagai penyediaan layanan infrastruktur oleh pemerintah dan entitas badan usaha. PPP menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh sumber biaya tambahan untuk investasi infrastruktur (Tamrin, 2021). Pemerintah masih mempunyai wewenang di dalam mitra atau badan usaha yang diajak berkolaborasi pada pelaksanaan PPP (Nugroho dan Toyib, 2018). Secara singkat, *Public Private Partnership (PPP)* diartikan sebagai keterlibatan dan hubungan saling menguntungkan dari berbagai pihak yang berkelanjutan dalam bentuk kontrak kerja sama yang relatif lama guna mengembangkan suatu program ataupun fasilitas publik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik antara pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, perbankan/konsorsium sebagai penyandang dana, serta pihak swasta/BUMN/BUMD yang berfungsi sebagai *Special Purpose Company*

(SPC) yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi suatu proyek mulai dari proses desain, konstruksi, pemeliharaan dan operasional.

Penyelenggaraan *Public Private Partnership* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Melalui peraturan tersebut, PPP yang semula dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berubah menjadi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Tujuan proyek KPBU atau PPP yaitu mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.

Public Private Partnership menjadi strategi dalam permasalahan keterbatasan anggaran (*financing gap*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan *creative financing* sebagai solusi selain menggunakan dana APBN. Melalui skema tersebut, pemerintah mengajak peran serta swasta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur,

tetapi skema kerja sama antara badan usaha dan pemerintah bukanlah privatisasi.

Secara definisi, privatisasi dipahami sebagai pembelian aset milik pemerintah oleh swasta sedangkan KPBU/PPP dipahami sebagai kerja sama pemerintah dengan swasta dalam hal menyediakan layanan. Hal paling dasar selanjutnya yang membedakan privatisasi dengan KPBU yaitu kepemilikan aset. Privatisasi bersifat memindahtangankan aset pemerintah secara permanen kepada swasta sedangkan dalam KPBU/PPP aset pemerintah hanya dipinjamkan selama jangka waktu perjanjian. Aset yang dipinjamkan tersebut juga harus digunakan untuk kepentingan publik. Adapun perihal kendali kebijakan, pemerintah tetap memegang kendali terhadap isi-isu utama untuk kepentingan masyarakat meskipun operasionalisasi proyek dikerjakan oleh badan usaha. Pada pelaksanaan PPP dalam pengelolaan wisata, tarif yang dikenakan kepada pengunjung ditetapkan oleh pemerintah sedangkan pihak badan usaha membawa inovasi, efisiensi, dan dana investasi. Penetapan tarif layanan oleh pemerintah merupakan bentuk pemenuhan sifat KPBU/PPP dimana harga layanan perlu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Mengingat adanya keterlibatan pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan akan kepentingan publik dalam skema KPBU cenderung tinggi dibandingkan dengan privatisasi.

Berdasarkan tipologinya, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mempunyai banyak objek wisata potensial mulai dari wisata agro hingga wisata bahari. Menurut pernyataan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, hampir

semua daerah di Jawa Tengah mempunyai potensi wisata lokal yang bisa dioperasikan dan dikembangkan oleh masyarakat (Jatengprov.go.id). Berdasarkan klasifikasi daerah dalam penelitian milik Mustofa & Haryati (2018), Pati menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata alam. Adapun Kabupaten Pati juga dikenal dengan wisata berbasis agro yang dimilikinya.

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki potensi pariwisata berbasis agrowisata adalah Kabupaten Pati. Daerah Kecamatan Gembong yang terletak di Kabupaten Pati dikenal sebagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani yang komoditas utamanya yaitu padi serta tanaman buah seperti durian, jeruk pamelon, dan rambutan (Patikab, 2009). Di antara komoditas tersebut, kopi Jollong, jeruk pamelon, dan buah naga menjadi komoditas khas dari Kabupaten Pati khususnya Agrowisata Jollong. Agrowisata Jollong merupakan salah satu objek pariwisata yang terletak di Kabupaten Pati tepatnya di Desa Sitaluhur, Kecamatan Gembong. Sejak 2012, Wisata Agro Jollong mulai dikembangkan dan dirintis oleh BUMN yaitu PTPN. Kawasan tersebut meliputi perkebunan kopi, perkebunan buah naga, perkebunan jeruk pamelon, pabrik untuk mengolah kopi, area foto untuk wisatawan berbasis alam, dan area bermain anak dengan total luas kawasan yaitu 530 ha (PTPN IX, 2017). Agrowisata Jollong juga menjadi satu-satunya tujuan pariwisata di Kabupaten Pati yang mencakup lingkungan alam, rekreasi, wilayah perkebunan, dan edukasi.

Agrowisata Jollong mampu menjadi salah satu destinasi dikarenakan letaknya yang jauh dari perkotaan sehingga memiliki udara yang tidak berpolusi.

Kondisi tersebut selaras dengan pernyataan Arioditha dan Djuwendah dalam Nurani (2020) bahwa wisatawan cenderung menjadikan objek wisata alam sebagai opsi untuk beristirahat dari rutinitas sehari-hari dan efek polusi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Remaylian Nurani, Roesalli, dan Ekowati, dikatakan oleh Kabid Destinasi Pariwisata Kabupaten Pati, Joko Prasetyo, bahwa Agrowisata Jollong menjadi satu dari sekian destinasi pariwisata populer di Kabupaten Pati dengan jumlah kunjungan tertinggi.

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Objek Wisata Jollong di Kabupaten Pati Tahun 2018-2021

No.	Nama Objek Wisata	Jumlah Pengunjung			
		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Waduk Gunungrowo	82.890	73.440	17.010	15.800
2.	Gua Pancur	96.100	96.380	4.600	1.500
3.	Gua Wareh	48.695	65.670	15.705	7.949
4.	Deswita Pancasila Jrahi	30.460	61.316	27.841	18.326
5.	Agrowisata Kebun Jollong	216.912	276.894	126.486	83.838
6.	Pantai Banyutowo	7.290	50.596	9.681	-
7.	Edu Agroeduforestry Resort (EAR) Regaloh	16.040	14.419	1.149	370
8.	Bukit Pandang Kayen	36.493	13.893	14.360	3.351
9.	Lorodan Semar	-	11.475	4.058	1.359
10.	Pantai Idola	-	-	9.681	7.200
11.	Desa Wisata Talun	67.321	68.507	22.672	4.783
12.	Arga Pesona Beketel	-	-	-	343
13.	Dam Tepus	-	-	-	256
14.	Deswita Bageng	-	-	-	3.016

15.	DeswitaTunggulsari	-	-	-	83.778
16.	PesonaGunungsari	-	-	-	941
17.	Waduk Seloromo	-	-	-	18.055
18.	PantaiKertomulyo	-	-	-	52.441

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati

Jollong menjadi objek pariwisata yang memiliki kunjungan tertinggi di Pati dengan komoditas unggulannya yaitu perkebunan buah naga yang mana di dalam paket wisata yang disediakan, wisatawan bisa menjalankan kegiatan memetik buah secara langsung dari tanaman. Berbagai jenis kegiatan pengolahan produk pertanian termasuk teknologinya juga disediakan dalam paket wisata Agro Jollong. Maka dari itu, selain mendapatkan pengalaman rekreasi, para pengunjung juga dapat menambah pengetahuan di bidang pertanian.

Guna mengembangkan potensi Agrowisata Jollong, pemerintah Pati bekerja sama dengan PTPN IX melalui kesepakatan bersama dan perjanjian bersama dengan jangka waktu 1 tahun dan 5 tahun sejak 8 Januari 2018. Selama kerja sama berlangsung, terdapat beberapa permasalahan yang seharusnya menjadi perhatian para aktor. Permasalahan pertama yaitu terkait penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan sebanyak 276.894 mengalami penurunan menjadi 126.486 pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2021 dengan jumlah kunjungan sebanyak 83.838.

Permasalahan kedua yaitu penurunan jumlah kunjungan tentunya diikuti oleh penurunan pendapatan. Diketahui bahwa pendapatan Agrowisata Jollong meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp2,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp1,7 miliar. Adapun target pendapatan di tahun 2019 adalah Rp2,9 miliar (antaranews.com). Akan tetapi, pada tahun berikutnya terjadi pandemi sehingga mempengaruhi target jumlah pendapatan.

Permasalahan ketiga yaitu terkait kurangnya inovasi atau pembaruan di Jollong guna menarik perhatian massa yang lebih besar. Dalam penelitian milik Christina (2018) diungkapkan bahwa inovasi yang kurang disebabkan oleh kurangnya SDM. Pada kemitraan pariwisata, komitmen antar aktor dalam pengembangan objek wisata dapat tercermin dalam penciptaan inovasi baru yang menunjang objek wisata yang sudah tersedia agar pengunjung tidak jenuh (Nugroho, 2014).

Permasalahan keempat berasal dari penelitian terdahulu milik Handayani (2020) yang menyatakan bahwa komitmen Agrowisata Jollong masih kurang dalam segi pemeliharaan dari pihak pengelola yang ditandai dengan adanya sampah yang masih ditemukan di area wisata.

Kemitraan yang ideal digambarkan dengan tidak adanya pihak yang sifatnya saling membawahi pihak lain, serta dasar komitmen bersama menjadi tanggung jawab bersama yang mewajibkan setiap pihak untuk memberikan input dalam penyusunan agenda kerja sehingga akan memunculkan kolaborasi *good partnership* jejaring antar pihak. Permasalahan yang ada pada agrowisata

Jollong selama Pemkab Pati dan PTPN IX bekerja sama menarik untuk diteliti. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah kerja sama yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan potensial untuk dilanjutkan atau sebaliknya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan *public private partnership* pada pengelolaan Agrowisata Jollong, sehingga nantinya diharapkan hasil penelitian ini mampu menemukan penjabaran dan solusi yang tepat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi.

1. Jumlah kunjungan Agrowisata Jollong mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan sebanyak 276.894 mengalami penurunan menjadi 126.486 pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2021 dengan jumlah kunjungan sebanyak 83.838.
2. Jumlah kunjungan mempengaruhi jumlah pendapatan Agrowisata Jollong. Terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp2,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp1,7 miliar. Pada tahun 2019 memiliki target menjadi Rp2,9 miliar, tetapi menurun di tahun 2020 karena pandemi.
3. Sejauh ini inovasi atau pembaruan di Jollong guna menarik perhatian massa yang lebih besar masih kurang sedangkan menurut Nugroho

(2014) komitmen antar aktor dalam mengelola objek wisata dapat tercermin dengan penciptaan kreasi-kreasi baru.

4. Berdasarkan penelitian terdahulu milik Handayani (2020), komitmen Agrowisata Jollong masih kurang dalam segi pemeliharaan dari pihak pengelola yang ditandai dengan adanya sampah yang masih ditemukan di area wisata.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam pengelolaan Agrowisata Jollong berjalan dengan baik?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam pengelolaan Agrowisata Jollong?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam pengelolaan Agrowisata Jollong.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam pengelolaan Agrowisata Jollong.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Teoritis

Ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait seperangkat teori di dalam pelaksanaan *Public Private Partnership* pengelolaan pariwisata khususnya agrowisata dapat terus diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian ini.

1.5.2 Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh dari aktivitas pembelajaran selama periode perkuliahan.

2. Bagi Organisasi Terkait

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan mampu memberikan solusi dan pandangan yang berasal dari pihak di luar organisasi terkait pelaksanaan *Public Private Partnership* pengelolaan pariwisata pada Agrowisata Jollong.

3. Bagi Pembaca

Pembaca dapat memperoleh pengetahuan tambahan terkait pelaksanaan *Public Private Partnership* pengelolaan pariwisata pada Agrowisata Jollong.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian
1.	Ratnasari, Fitrilia; 2018	Strategi Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Pati	Mengidentifikasi sistem pengelolaan objek wisata di Kabupaten Pati serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan objek wisata di Kabupaten Pati.	Objek wisata di Pati memiliki potensi yang baik. Akan tetapi, masih memerlukan pemeliharaan fasilitas yang ada agar menambah kenyamanan pengunjung. Terdapat beberapa hal yang masih menjadi hambatan seperti kurangnya SDM, keterbatasan anggaran, dan keamanan yang belum baik. Perbaikan fasilitas pada objek-objek wisata di Kabupaten Pati perlu dilakukan salah satu caranya yaitu melakukan kerja sama dengan investor.
2	Apriliani, Afmi; Rahmawati, Rita; Azahari, Ratnasari; 2018	Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan wisata Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi	Mengidentifikasi model <i>Public-Private Partnership</i> dalam pengembangan Geopark Ciletuh Palabuhanratu.	Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam pengembangan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi berjalan baik. Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti pengawasan dan kualitas SDM. Sumber daya keuangan juga perlu ditingkatkan guna pemeliharaan dan pengembangan fasilitas.
3	Priatama; 2019	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bus Rapid	Menganalisis evaluasi kebijakan Bus Rapid	Evaluasi kebijakan BRT Trans Semarang Jurusan

		Transit (Brt) Trans Semarang Rute Koridor VI Jurusan “UNDIP-UNNES”	Transit di kota Semarang yang bertujuan memperbaiki transportasi publik serta menjelaskan faktor penghambat dan pendorongnya.	UNDIP-UNNES masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan ini memiliki kaitan dengan fasilitas sarana prasarana dan integrasi dengan transportasi umum lain.
4	D, Akbar; Ikhsan, K; 2019	Public-Private Partnership Dalam Pengoptimalan Wisata Bintan Mangrove	Menganalisis pelaksanaan public-private partnership antara Perseroan Terbatas (PT) Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengoptimalan wisata Bintan Mangrove.	Tipe kemitraan yang dilakukan BRC bersama masyarakat yaitu <i>Add, Operate and Transfer</i> . Kesepakatan yang direncanakan dan disetujui bersama berjalan sesuai dengan komitmen dan prinsip antar pihak. Prinsip yang diterapkan dalam kemitraan ini yaitu pemberdayaan. Kemitraan antara PT Bintan Resort Cakrawala dan Kelompok Sadar Wisata dalam pendekatan <i>public-private partnership</i> menggunakan desain kemitraan <i>collaborative dynamics</i> yang berarti berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
5	F, Rey; Hamudi; Saidi; 2019	Public Private Partnership of Waste Management in West Java	Menganalisis skema PPP di TPPAS Nambo.	Skema PPP masih memiliki permasalahan terutama pengelolaan biaya serta penentuan harga untuk bahan bakar. Hasil penelitian mencakup pengolahan limbah yang belum maksimal, skema pendanaan yang

				berbelit-belit untuk pengelolaan limbah, dan penghentian optimalisasi kebijakan KPS untuk pengelolaan limbah.
6	R, Didi; Kurniawan; 2020	Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur	Menganalisis efektivitas dan manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial.	Kemitraan yang dilaksanakan antara pemerintah dan swasta Kabupaten Bogor belum efektif. Hal tersebut dikarenakan hanya dimensi nilai bisnis dan insentif yang berjalan baik terhadap kemitraan pemerintah dan swasta. Adapun kemitraan yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum mampu mencapai hasil yang ditargetkan karena terdapat dimensi yang belum terlaksana yaitu dimensi pengembangan kapasitas sumberdaya dan dimensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
7	R, Nurani; Roessali, W; Ekowati, T; 2020	Strategi pengembangan Agrowisata Jollong di Kabupaten Pati	Merumuskan strategi alternatif yang dapat diterapkan dalam pengembangan Agrowisata Jollong.	Alternatif skema yang bisa diaplikasikan sesuai keadaan Agrowisata Jollong saat ini yaitu pengembangan area foto dengan <i>background</i> pemandangan alam beserta objek wisata unggulannya. Adapun dukungan dari Pemkab yang dibuktikan dengan kolaborasi dalam pembuatan jalur penghubung antara Jollong 1 dan Jollong 2 diharapkan dapat

				mempermudah akses kunjungan wisatawan.
8	Suherlan; Hidayah, Nurdin; Mada, Wientor; Nurrochman; Wibowo, Budi; 2020	Kemitraan Strategis Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kab. Malang, Jawa Timur	Menganalisis tentang kemitraan strategis antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata (GBT) Gubugklakah Kabupaten Malang Jawa Timur.	Arah strategi & kebijakan pengembangan Desa Wisata Gubugklakah yaitu membuat Desa Wisata dikelola secara profesional dengan pendekatan bisnis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka pentahelix. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Partisipasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan GBT pada prinsip kemitraan strategis telah terlaksana dengan baik dibuktikan melalui sikap kompak berdasarkan komitmen, terbuka, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan.
9	Syafari; 2018	Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Banjarmasin	Mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah kota di Banjarmasin.	Berdasarkan program 2 tahunan, pengelolaan sampah di Banjarmasin sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari output dan outcome programnya. Kebersihan lingkungan di kota juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya.
10	A, Patu; Akhmadi; 2021	Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare	Menganalisis tahap penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare.	Penyiapan proyek KPBU KA Makassar-Parepare telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat hambatan dalam proses persiapan seperti pada bagaian

				penetapan trase jalur kereta yang mengalami perubahan jadwal karena masalah pembebasan lahan, serta minimnya pemahaman penanggungjawab program kerjasama (PJK) terhadap konsep KPBU.
11	Djabbari, M; Alwi; Suryadi; 2021	Public Private Partnership in Tourism Development in North Toraja Regency	Mengetahui bagaimana model dan keberhasilan Public Private Partnership (PPP) dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.	Terdapat kesepakatan bagi hasil dari kolaborasi yang memiliki dampak pada retribusi serta jasa pariwisata. Pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta berjalan efektif untuk meningkatkan pendapatan pelayanan kepada pengunjung atau wisatawan. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pengembangan objek wisata terbukti lebih efisien dengan menerapkan kerjasama pemerintah-swasta. Model life cycle contract (LCC) dalam perjanjian kerjasama (MOU) antara pihak swasta dan pemerintah menunjukkan bahwa pihak swastalah yang menginisiasi pembangunan di daerah tujuan wisata. Pihak swasta menjadi pemilik objek wisata yang melakukan pengembangan mulai dari desain, pembangunan,

				pembiayaan, dan pemeliharaan pada tahap awal sebelum ada kerjasama dengan pemerintah.
12	Irvan; Sujianto; Asari; 2022	Evaluasi Kebijakan Kerjasama Operasional Pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai	Mengidentifikasi kebijakan kerjasama operasional pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai Kota Dumai.	Pelaksanaan kerja sama pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai belum terlaksana dengan baik. Hal ini diakibatkan SDM yang belum memadai, serta fasilitas yang masih kurang. Sedangkan faktor yang menghambat pengoperasian Bandar Udara Pinang Kampai ini meliputi tenaga kerja, fasilitas serta identitas kepemilikan aset Bandar Udara Pinang Kampai.
13	Xu, Xiumei; Yicheng, Huang; Lai, Qun; Feng, Chao; 2023	Testing the Stakeholders' Partnership in a Tourism Waste Management Network: An ERGM approach	Mengeksplorasi struktur kemitraan pemangku kepentingan dalam jaringan pengelolaan limbah pariwisata.	Berbagai kelompok pemangku kepentingan telah banyak terlibat dalam pengelolaan limbah pariwisata di Motuo County. Mitra bersama edgewise yang dibentuk oleh pemangku kepentingan dari berbagai kelompok meningkatkan efisiensi transmisi informasi jaringan. Hasilnya berimplikasi pada pengelolaan limbah pariwisata, khususnya untuk mempromosikan transisi keberlanjutan melalui tata kelola jaringan.
14	Wan, Yim; Li, Xiangping; Lau, Meng; Dioko, Leonardo; 2022	Destination Governance in Times of Crisis and the Role of Public-private Partnerships in Tourism Recovery from	Mengkaji bagaimana Macao mengadopsi tata kelola kemitraan publik-swasta untuk membantu pemulihan	Kolaborasi yang dicapai antara sektor pariwisata publik dan swasta di Macau menggambarkan salah satu cara untuk

		COVID-19: The Case of Macao	industri pariwisatanya.	memerangi COVID-19. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh pembangunan yang erat, pendekatan langkah demi langkah, dan juga intervensi yang tepat waktu dari pemerintah Macao dan para pemimpin krisisnya dalam membimbing dan mendorong kemitraan. Pemimpin krisis (CE Macao) memupuk kemitraan dengan membangun struktur dan pedoman komunikasi yang jelas, mendorong biro pemerintah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan bisnis pariwisata, menyalurkan pandangan mereka kepada Pemerintah Pusat, dan merancang skema pemulihan.
15	Jotaworn, Surasak; Nitivattananon, Vilas; 2023	Multi-stakeholder Synergies for Enhancing Environmental Management of Beach Recreation in the Eastern Coast, Thailand	Mengeksplorasi peran pemangku kepentingan sektor publik terkait rekreasi pantai untuk menemukan peluang sinergis dalam meningkatkan pengelolaan limbah padat kota di wilayah timur Thailand.	Temuan menunjukkan bahwa, selain tantangan, potensi, dan sinergi lintas sektor yang diidentifikasi dalam literatur, studi ini menemukan peluang sinergi dengan jenis kemitraan lainnya secara khusus. Untuk menjelaskan sinergi dan studi <i>multi-stakeholder</i> , manfaat yang diperoleh dan ekosistem harus diindikasikan untuk merangsang kemitraan dan meningkatkan pengelolaan limbah

				padat kota dalam keberlanjutan tujuan wisata pesisir.
--	--	--	--	---

Sumber : Jurnal yang telah diolah, 2023

Peneliti pada penelitian yang dilakukan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti terkait evaluasi *Public-Private Partnership* dalam pengelolaan pariwisata pada Agrowisata Jollong.

Penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan bertujuan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang peneliti lakukan tidak memplagiasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti tidak menemukan judul penelitian yang sama, serta fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan semuanya berbeda. Selain itu, penelitian terdahulu berguna sebagai sumber referensi peneliti untuk melakukan penelitian. Terdapat beberapa data yang peneliti dapatkan dari penelitian terdahulu seperti penerimaan pendapatan daerah dari Agrowisata Jollong dan profil Agrowisata Jollong. Penelitian terdahulu juga digunakan untuk menjadi acuan peneliti dalam menambah teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian yang dilaksanakan.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *administration* atau *to administer* yang berarti mengelola (*to manage*) atau mengarahkan (*to direct*). Administrasi dalam makna yang lebih sempit berarti kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Menurut Pasolong (2014:6) publik diartikan sebagai kumpulan individu yang memiliki kesamaan dalam berpikir, menyalurkan perasaan, harapan, sikap, dan perilaku sesuai dengan aturan

yang ada. Pengertian luas administrasi menurut Siagian adalah seluruh proses implementasi kegiatan yang dilaksanakan oleh dua personil atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi terwujudnya tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) merupakan suatu proses sumber daya dan anggota publik yang diorganisasikan dan diatur untuk menciptakan serta mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik. McCurdy dalam Keban (2014:3) menjelaskan tentang administrasi publik sebagai sebuah prosedur politik, yang berarti administrasi publik menginstruksikan pelaksanaan pemerintahan serta bisa dianggap sebagai cara yang esensial guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.

Mengutip dari penjelasan beberapa ahli terkait definisi administrasi publik, maka dapat dikatakan bahwa administrasi publik merupakan kolaborasi sekelompok manusia pada organisasi publik secara bersama-sama dalam kegiatan untuk mengatasi berbagai masalah publik melalui produk kebijakan publik serta adanya proses pengelolaan dalam manajemen publik yang baik untuk mencapai tujuan negara.

1.6.3 Paradigma Manajemen Publik

Paradigma menjabarkan konsep yang diterapkan para ahli dalam memaparkan suatu kondisi akan perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sudut pandang ilmu pengetahuan dengan tujuan melakukan penganalisisan suatu peristiwa sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Paradigma Manajemen Publik mengalami pergeseran-pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman, awalnya dari paradigma *Old Public Administration* (OPA) berkembang menjadi

paradigma *New Public Management* (NPM) dan *New Public Service* (NPS) yang menyebabkan perubahan penyebutan *government* menjadi *governance*. Dari pergeseran paradigma inilah muncul istilah tentang *collaborative governance*, dengan melibatkan pihak ketiga selain institusi pemerintah, yaitu kelompok-kelompok kepentingan masyarakat atau *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di publik.

Gagasan Wilson tentang *Old Public Administration* (OPA) dapat disarikan dalam dua hal, yaitu pertama pemisahan politik dan administrasi (gagasan Wilson pada tahun 1830). Politik harus berhubungan dengan kebijakan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara. Administrasi Negara sebagai badan eksekutif melaksanakan kebijaksanaan itu secara tidak memihak. Ketika kebijakan telah ditetapkan, maka administrasi negara baru bekerja. Administrator publik harus melaksanakan *accountability* kepada pejabat politik yang telah terpilih (*administrators were held to be accountable to their political masters and only thought them to the citizenry*). Adapun yang kedua, publik administrator harus mencari efisiensi sebesar mungkin dalam operasi-operasinya dan juga mencapai efisiensi yang terbaik dalam mencapai tujuannya melalui penyatuan keseragaman. Hal tersebut harus terjadi dalam struktur hierarkis.

Paradigma *New Public Management* (NPM) sesungguhnya merupakan upaya pencarian dari para ahli administrasi negara terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi pemerintah di berbagai negara maju maupun negara yang sedang berkembang sebagai dampak dari berbagai krisis yang melanda

negara-negara yang bersangkutan. Para ahli tersebut umumnya tidak puas dengan kerangka pendekatan dan instrumen-instrumen ilmiah administrasi negara yang konvensional atau ortodoks, yang ternyata tidak efektif lagi ketika dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan eksternal yang dihadapi pemerintah untuk melayani masyarakat dengan baik. Tantangan inilah yang kemudian hendak dijawab dengan kerangka paradigma baru administrasi negara yang disebut dengan *New Public Management* (NPM). NPM pada dasarnya sebagai pendekatan dalam administrasi publik yang mampu menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Berdasarkan pandangan *The New Public Service* (NPS) gagasan warga negara sebagai pelanggan sering juga menimbulkan konflik dalam tataran praktek dan akademik, misalnya kebijakan luar negeri dan perlindungan lingkungan, maka tidak bisa dihubungkan dengan *individual costumers*, tetapi semua individu-individu dalam masyarakat menerima pelayanan tersebut, tidak menjadi penting apakah mereka menginginkan atau tidak.

Adapun penelitian ini menggunakan paradigma *New Public Management* (NPM). Konsep NPM memaksa pemerintah untuk mengadopsi teknik administrasi bisnis maupun nilai-nilai bisnis seperti kompetisi, pilihan pelanggan, dan respek atas semangat kewirausahaan. Reformasi dalam sektor publik telah menghendaki pengadopsian keunggulan-keunggulan yang ada di sektor swasta untuk dimasukkan ke dalam prinsip-prinsip manajemen sektor publik dengan tujuan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas serta memperbaiki akuntabilitas kinerja.

Paradigma NPM dan model *public-private partnership* yang diimplementasikan dalam pengembangan pariwisata memiliki kaitan yang erat karena sama-sama berfokus pada privatisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik bidang pariwisata yang lebih baik. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *public-private partnership* dalam pengelolaan Agrowisata Jollong merupakan bagian dan perwujudan dari paradigma *New Public Management* dalam pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

1.6.4 Pelaksanaan *Public-Private Partnership*

Kemitraan (*partnership*) secara umum dapat dimaknai sebagai bentuk kolaborasi yang saling memberikan keuntungan antara dua aktor atau lebih untuk mewujudkan tujuan yang disepakati bersama. Sulistyani (2017:129) memaknai kemitraan sebagai aliansi antara dua aktor atau lebih yang membentuk suatu ikatan kolaboratif berdasarkan perjanjian dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas pada suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. Kemitraan dapat terwujud apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yaitu melibatkan dua aktor atau lebih, saling membutuhkan, dan memiliki kesamaan visi dan misi dalam mencapai tujuan.

Terdapat tiga prinsip dalam kemitraan yaitu kesetaraan (*equity*), saling menguntungkan, serta transparansi. Kesetaraan berarti terdapat kerja sama yang saling menghargai, saling mematuhi, dan saling meyakini. Agar tidak timbul rasa curiga antar mitra, maka diperlukan transparansi. Sementara itu, prinsip

memberikan keuntungan satu sama lain dimaksudkan bahwa kerja sama yang terjalin harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Public-Private Partnership (PPP), secara luas didefinisikan sebagai penataan kelembagaan antara aktor sektor publik dan badan usaha (Hodge and Greve, 2007). *The UK Commission for Public Private Partnership* (dalam Arewa and Farrell, 2011) menggambarkan PPP sebagai kolaborasi berkelanjutan antara entitas publik dan badan usaha yang menggabungkan usaha dan pelayanan kemudian dilakukan pengembangan dengan risiko, biaya, dan keuntungan yang dibagi. Sedangkan Linder (1999) memandang PPP sebagai terminologi baru dalam bahasa manajemen publik, yang dimaksudkan untuk memasukkan prosedur keterlibatan organisasi badan usaha yang lebih berpengalaman dan mapan dalam menyampaikan layanan publik. Skema PPP dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Penerapan Skema KPBU/PPP

No.	Aspek	KPBU/PPP
1	Bentuk	Kerja sama dengan swasta dalam penyediaan aset/layanan
2	Tujuan	Aset digunakan untuk kepentingan publik
3	Kepemilikan Aset	Aset tetap milik pemerintah di akhir perjanjian meski dikelola oleh swasta
4	Alokasi Risiko	Terdapat pembagian alokasi risiko
5	Subsidi	Pengguna layanan dapat diberikan subsidi
6	Perlindungan Kepentingan Publik	Perlindungan kepentingan publik tinggi karena adanya peran pemerintah
7	Harga Layanan	Sesuai dengan kemampuan masyarakat

Sumber: kemenkeu.go.id (diakses tanggal 3 Juni 2024)

Casanova (2011) memberikan penjelasan terkait pedoman atau prinsip penting untuk menilai pelaksanaan kemitraan yang dianggap berhasil, prinsip-prinsip meliputi: (1) *Equity*, proyek dalam *Public Private Partnership* harus berjalan adil, yang berarti para aktor selaku pengguna dan penerima manfaat dari pemakaian infrastruktur perlu mendanai biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan pemakaiannya; (2) *Effectiveness*, berfokus pada pengawasan pendapatan, urusan keuangan, kualitas pelayanan dan pemeliharaan guna memberi kepastian bahwa infrastruktur sarana prasarana dan pelayanan publik diadakan dengan maksimal selama kerja sama berjalan. Pemerintah berperan menjadi *leading sector* pada pembangunan infrastruktur sektor publik harus memiliki sikap proaktif terhadap keperluan publik; (3) *Efficiency*, PPP terbukti lebih efisien dalam penyediaan dan pemeliharaan. Badan usaha mempunyai keunggulan perihal beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga diharapkan efisiensi pelayanan bisa terwujud; (4) *Exportability*, berfokus pada pergeseran alokasi risiko dari pemerintah ke badan usaha. Pemerintah tidak perlu mengalami risiko kerugian untuk memberi pertanggungjawaban kepada badan usaha. Meskipun demikian, badan usaha harus tetap membagi keuntungan secara wajar, prosedur pembiayaan harus sesuai dan transparan serta fleksibel (Setiawan & Sukma F, 2012). Adapun Kuswidanti (2008) juga menjelaskan tiga kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing pihak bermitra yaitu prinsip kesetaraan (*equity*), prinsip keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Adapun dalam kerja sama yang dijalankan dalam pengelolaan Agrowisata Jollong, PTPN IX berkedudukan sebagai pemilik kawasan Agrowisata Jollong.

Adapun dalam nota kesepahaman, disebutkan bahwa kewajiban Pemkab Pati adalah memfasilitasi infrastruktur jalan sedangkan haknya yaitu mendapatkan kontribusi 10 persen. Bentuk kerjasama yang terjadi yaitu kesepakatan bersama dan perjanjian bersama dengan jangka waktu 1 tahun dan 5 tahun sejak tanggal 8 Januari 2018.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025, kegiatan pembangunan Agrowisata Jollong dilakukan berdasarkan program pembangunan zona wisata tematis secara terpadu dan saling melengkapi antar kawasan serta peningkatan kualitas lingkungan guna menunjang kegiatan kepariwisataan. Kegiatan yang dicapai dalam program tersebut yaitu pemasangan rambu-rambu dan pembatas bagi tempat-tempat di Jollong yang dapat dikunjungi atau digunakan. Adapun pembangunan kawasan Agrowisata Jollong bersama PTPN IX memiliki lingkup kegiatan yaitu membangun kebersamaan melalui peran para aktor, perbaikan dan pelebaran jalan menuju Agrowisata Jollong, penyediaan infrastruktur pada area agrowisata, peningkatan pembangunan infrastruktur pada Agrowisata Jollong, peningkatan kunjungan wisata, dan peningkatan perekonomian daerah.

Yusuf, Wallace, dan Hackbart (2006) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penting yang dipakai untuk menilai implementasi model *public private partnership*. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor Proses

Faktor proses mempertimbangkan pemerintah dalam penerapan kebijakan *public private partnership* untuk merumuskan capaian dan memaparkan secara rinci berbagai kebutuhan *public private partnership*. Faktor proses juga mengidentifikasi target populasi yang dilayani dari proyek yang dilaksanakan, tugas dan kewajiban dari pemerintah serta badan usaha. Selain itu, faktor proses juga melihat kondisi kelembagaan yang mendukung berjalannya kerja sama terutama yang berasal dari pimpinan yang sifatnya berkelanjutan.

2. Faktor Mitra

Faktor mitra berhubungan dengan proses pemilihan *partner* yang cocok dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan mitra terpilih. Mewujudkan ikatan kerja sama dengan mitra yang terpilih memiliki kaitan dengan pemerintah yang masih memiliki kontrol serta otoritas terhadap mitra yang menjalin kerja sama. Oleh karena itu, penerapan model *public private partnership* memerlukan komitmen yang baik antara pemerintah dan sektor badan usaha guna menjaga kelangsungan hubungan kerja sama tersebut.

3. Faktor Struktural

Dimensi yang difokuskan dalam faktor struktural yaitu tugas serta pertanggungjawaban yang rinci dari seluruh aktor terkait. Kejelasan tugas dan tanggung jawab para aktor terkait menjadikan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha berjalan efektif serta dapat menciptakan struktur yang rinci dalam melaksanakan dan memberikan

penilaian terhadap seluruh aktivitas yang diimplementasikan dalam model kolaborasi tersebut.

Evaluasi pelaksanaan PPP pada Agrowisata Jollong dilihat melalui prinsip pelaksanaan PPP menurut Casanova yang terdiri dari *equity*, *effectiveness*, *efficiency*, dan *exportability*.

1.7 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1 Definisi Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari evaluasi pelaksanaan *Public Privat Partnership* (PPP) yaitu penilaian pelaksanaan PPP dengan membandingkan perencanaan kegiatan dengan hasil yang didapat. Adapun fenomena yang dikaji adalah sebagai berikut:

- a. *Equity* : Proyek PPP antara Pemerintah Kabupaten Pati dan PTPN IX harus berjalan dengan adil.
- b. *Effectiveness* : Memastikan bahwa infrastruktur dan pelayanan yang ada pada Agrowisata Jollong disediakan dengan sebaik-baiknya dalam masa kerja sama.
- c. *Efficiency* : Pelaksanaan PPP pada Agrowisata Jollong dalam penyediaan dan pemeliharaan harus terbukti lebih efisien dilihat dari mekanisme perhitungan *cost & benefit* serta perkembangan fasilitas pelayanan dan objek wisata.

- d. *Exportability* : Berfokus pada perpindahan alokasi resiko dari pemerintah Kabupaten Pati ke PTPN IX. Pemerintah tidak perlu menanggung kerugian untuk memberikan jaminan kepada badan usaha. Selain itu peneliti juga melihat faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan *Public Private Partnership* pada Agrowisata Jollong, sebagai berikut:
- a. Faktor Proses : Merupakan perumusan tujuan dan menjelaskan secara rinci kebutuhan-kebutuhan *public private partnership* terutama perihal alasan ekonomi.
 - b. Faktor Mitra : Merupakan proses pemilihan mitra kerja sama yang sesuai dan membangun hubungan kerja dengan mitra tersebut.
 - c. Faktor Struktural : Merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas dan rinci dari seluruh pihak yang terlibat.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini, menggunakan teori dari Casanova bahwa keberhasilan dari *Public Private Partnership* dilihat dari:

1. Equity

- a. Adanya pembagian peran yang adil antara PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati.
- b. Adanya pembagian keuntungan yang adil bagi PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati
- c. Adanya pembagian pemeliharaan fasilitas yang dibagi secara adil antara PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati.

2. *Effectiveness*

- a. Adanya pengawasan baik pendapatan maupun pemeliharaan yang dilakukan oleh PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati.
- b. Adanya peningkatan kualitas layanan sejak dilakukan kerja sama.

3. *Efficiency*

- a. Adanya perhitungan *cost and benefit* dari adanya PPP yang dilakukan oleh PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati.
- b. Adanya perkembangan fasilitas pelayanan dan objek wisata.

4. *Exportability*

- a. Adanya pergeseran alokasi risiko dari pemerintah Kabupaten Pati ke PTPN IX.
- b. Adanya transparansi proses pelaksanaan pengelolaan Agrowisata Jollong.
- c. Adanya akuntabilitas pelaksanaan kerja sama antara PTPN IX dan Agrowisata Jollong.

Adapun peneliti melihat faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan *Public Private Partnership* pada Agrowisata Jollong melalui:

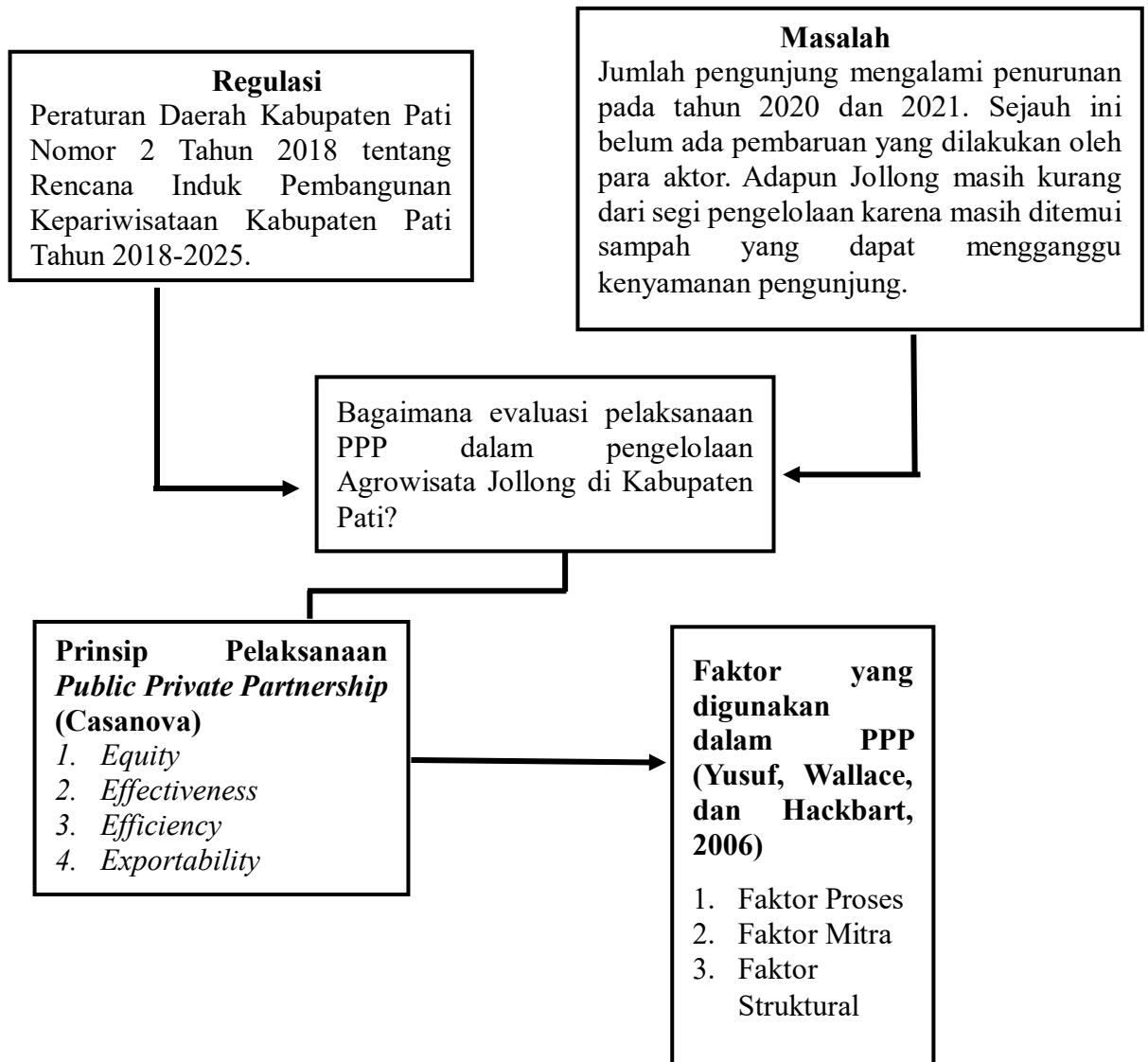
1. Faktor Proses

- a. Tujuan dilakukan kerjasama dalam pengelolaan Agrowisata Jollong.
- b. Kebutuhan yang diperlukan dalam pengelolaan Agrowisata Jollong.
- c. Target populasi yang dilayani dari program kerjasama.

2. Faktor Mitra

- a. Proses memilih mitra kerja oleh PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati.
 - b. Proses membangun komitmen antara PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Faktor Struktural
- a. Pembagian peran dan tanggung jawab antara PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati.
 - b. Adanya penegakan akuntabilitas kontrak antara PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati.

1.8 Kerangka Pikir Penelitian



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang menggambarkan secara deskriptif sebagai fokus penelitian berdasarkan data yang diolah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam pengelolaan pariwisata pada Agrowisata Jollong di Kabupaten Pati. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, deskripsi, fakta akurat berbasis data, serta hubungan antar fenomena yang diteliti yaitu evaluasi pelaksanaan *Public Private Partnership* dalam pengelolaan pariwisata.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pati. Penetapan lokasi penelitian merupakan langkah yang terpenting ketika melangsungkan penelitian kualitatif karena melalui penetapan lokasi, maka objek serta tujuan dilaksanakannya penelitian dapat ikut ditetapkan. Adapun alasan peneliti memilih Agrowisata Jollong yang berada di Kabupaten Pati sebagai lokasi penelitian yaitu terdapat beberapa permasalahan yang dapat diamati selama pelaksanaan kerjasama antara PTPN IX dan Pemerintah Kabupaten Pati seperti jumlah kunjungan yang menurun, pemeliharaan yang belum maksimal, hingga belum terdapat inovasi yang mampu menarik perhatian publik.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan merupakan seseorang atau sekumpulan orang yang akan memberikan jawaban terkait sebuah fakta maupun pendapat pribadi. Penentuan subjek penelitian harus berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga penelitian ini memiliki subjek yang relevan dengan pengelolaan Agrowisata Jollong di Kabupaten Pati. Peneliti memerlukan beberapa narasumber/informan sehingga melibatkan semua pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan pengelolaan pariwisata yaitu perwakilan Dinas Pariwisata, Staff/Pengurus Agrowisata Jollong, dan perwakilan dari PTPN IX.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Wiratna Sujarweni (2014:89-94) berpendapat bahwa data pada penelitian dibagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif bisa berupa kalimat atau kata yang dapat dijelaskan maknanya. Sementara itu, data kuantitatif yaitu data yang umumnya berbentuk angka. Peneliti menggunakan jenis data kualitatif, yang nantinya data tersebut terdiri atas susunan teks atau informasi yang dijelaskan oleh para informan.

Sumber data menurut Sugiyono (2009:137) diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai informatif bagi pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan data penelitian. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer diartikan sebagai data yang didapatkan secara langsung pada sumber data yaitu dari narasumber terkait penelitian dengan prosedur wawancara.

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata Kab. Pati	Informan 1 dan 2	2
2	PT Perkebunan Nusantara IX	Informan 3	1
3	Koordinator Agrowisata Jollong	Informan 4	1
4	Staff Marketing Agrowisata Jollong	Informan 5	1
5	Staff Kantor PTPN Agrowisata Jollong	Informan 6	1
5	Pengunjung Agrowisata Jollong	Informan 7 dan 8	2

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu langkah yang dinilai krusial yaitu teknik pengumpulan data kerana tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas tanya jawab secara lisan guna mendapatkan keterangan. Jawaban yang didadapat bisa ditunjukkan dalam bentuk tulisan, atau rekaman audio, visual, hingga audio visual. Wawancara menjadi aktivitas utama dalam tinjauan pengamatan. Wawancara dapat dilaksanakan secacara langsung maupun tidak langsung. Wawancara yang dilakukan peneliti melibatkan Staff pengelola Agrowisata Jollong, perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, dan perwakilan dari PTPN IX.

b. Studi Dokumen

Sugiyono menyatakan bahwa studi dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen guna memperoleh keterangan atau informasi yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa mencari data yang berupa dokumen MoU perjanjian kerjasama, dokumentasi pendapatan Agrowisata Jollong selama dilakukan kerjasama.

1.9.6 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan analisis yang sifatnya induktif atau dapat diartikan sebagai analisis yang sesuai dengan data yang didapatkan, kemudian akan dilakukan pengembangan menjadi suatu hipotesis. Analisis data pada penelitian kualitatif biasanya dilaksanakan ketika mengumpulkan data secara langsung dan dilakukan pasca data selesai dikumpulkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2019).

1. Reduksi Data

Setelah data lapangan dikumpulkan, akan mencapai jumlah yang banyak, kompleks dan sulit. Maka, akan dilakukan reduksi data yang berarti meringkas, menentukan sesuatu yang pokok, berorientasi menentukan sesuatu yang penting, pencarian tema

dan polanya. Sehingga, reduksi data akan memudahkan peneliti untuk menerapkan teknik pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data maka selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Penelitian kualitatif umumnya menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Apabila melalui penyajian data, maka akan berpengaruh menjadi data dan bentuk pola dapat tersusun dan teorganisir dengan supaya mudah dimengerti. Penelitian kualitatif akan menggunakan teks naratif untuk menyajikan data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahapan awal, setelah membuat kesimpulan berdasarkan bukti data yang valid dan konsisten. Peneliti akan pergi ke lapangan guna mendapatkan data supaya membuat kesimpulan menjadi kredibel.

Agar mendapatkan data yang valid serta objektif sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan cara menganalisis konteks dari telaah pustaka dan analisis jawaban dari hasil wawancara bersama narasumber. Peneliti menggunakan software ATLAS.ti untuk melakukan analisis data. *Software* ini termasuk jenis program CAQDAS (*Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software*) atau QDA software (*Qualitative Data Analysis Software*). ATLAS.ti mampu membantu peneliti memberikan kode, mengorganisasi,

dan menganalisis data penelitian secara lebih efektif dan terstruktur. *Software* ini mampu mencerna berbagai jenis data, seperti data gambar, data video, data audio, maupun data tertulis. Hal ini memungkinkan peneliti dalam melakukan triangulasi dengan berbagai jenis pengumpulan data.

1.9.7 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:300). Sementara itu, menurut Burhan Bungin (2012:53), dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang mana telah ditentukan informan penelitian yang dianggap mampu menjawab fenomena yang diteliti.

1.9.8 Uji Validitas dan Reliabilitas

Teknik triangulasi adalah metode pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk kemudian dibandingkan dengan data yang telah dikumpulkan. Terdapat empat jenis triangulasi sebagai metode pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan metode, penyidik, sumber, dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber membandingkan

serta mencocokkan kebenaran informasi yang didapatkan melalui perbedaan waktu dan alat dalam metode kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong hal tersebut dapat diwujudkan melalui :

1. Melakukan perbandingan data hasil yang diamati dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan informasi yang dikatakan di publik dengan yang disampaikan secara personal.
3. Membandingkan pernyataan narasumber terkait situasi penelitian dengan yang kenyataan sepanjang waktu.